

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGUTAMAKAN PRODUK IMPOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Royan Al Hafiz¹, Muhibban²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Cileungsi, Indonesia
royalhafedz@gmail.com, afaafu123@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1, No: 2 Februari 2024
Halaman : 23-32

Abstract

This paper explores the government's policy of prioritizing imported products by considering the perspective of sharia economic law. Amidst the dynamics of international trade, government import policies have a significant impact on sharia economic principles, such as distributive justice and public welfare. Through literature review, policy analysis, and impact evaluation, this study identifies the misalignment between some import policies and sharia economic values, which may hinder the achievement of fair and inclusive economic distribution. However, it also reveals the potential to improve import policies by taking into account Islamic economic principles, such as by developing fairer distribution mechanisms and empowering equitable economic sectors. Through a better understanding of the interaction between import policies and Islamic economic values, this research provides guidance for the government in formulating trade policies that are more in line with Islamic economic principles and can improve the overall welfare of society.

Keywords:

Government Policy
Imported Products and Sharia
Economics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengumpulkan data dan analisis kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan impor yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara beberapa kebijakan impor dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi kebijakan impor yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan mengenai hasil penelitian ini meliputi identifikasi dampak kebijakan impor terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, potensi perbaikan kebijakan impor, serta implikasi pentingnya mempertimbangkan perspektif ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan impor di masa depan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat potensi untuk meningkatkan kebijakan impor agar lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti dengan mengembangkan mekanisme distribusi yang lebih adil dan memberdayakan sektor-sektor ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Produk Impor dan Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, interkoneksi antarnegara dalam bidang ekonomi telah menjadi ciri utama dari sistem perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi terisolasi secara geografis, melainkan sangat dipengaruhi oleh hubungan dagang dengan negara-negara lain (Aini, et al, 2023). Fenomena ini menjadikan perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan arah dan kekuatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Astuti, 2022). Setiap kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika ekonomi domestik, karena perdagangan internasional tidak hanya mempengaruhi aliran barang dan jasa, tetapi juga memengaruhi aspek-aspek lain seperti investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Implikasi dari kebijakan perdagangan pemerintah terutama terlihat dalam konteks impor produk-produk dari luar negeri. (Putra et al, 2023) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berpengaruh terhadap peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional memiliki dampak signifikan. Dalam kondisi pasar global yang kompleks, keputusan untuk mengutamakan produk impor memiliki dampak yang luas terhadap industri dalam negeri, keseimbangan perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Apakah negara lebih condong untuk mengandalkan produk impor atau

memprioritaskan produksi dalam negeri menjadi pertanyaan krusial dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang efektif. Hasil penelitian (Ardhana et al, 2023) menjelaskan bahwa kedelai memiliki posisi yang signifikan sebagai salah satu sumber protein yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti dari pentingnya kedelai dalam konteks ini dapat dilihat dari inklusinya kedelai dalam kebijakan nasional terkait pengadaan pangan. Hal ini menandakan bahwa kedelai dianggap sebagai bahan pangan yang strategis dan memegang peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Evaluasi terhadap kebijakan impor dari berbagai perspektif menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan manfaat yang merata bagi semua pihak terlibat.

Dalam konteks penelitian ini, fokus khusus diberikan pada analisis kebijakan impor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menawarkan pandangan unik mengenai perdagangan internasional, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi. (Batubara et al, 2024) menyoroti bahwa dalam konteks ekonomi Islam, tidak hanya fokus pada pencapaian kemakmuran materi di dunia, tetapi juga pada penekanan terhadap kebahagiaan di akhirat. Ini menyiratkan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, terdapat dimensi aksiologis yang sangat penting, merujuk pada nilai-nilai moral yang melampaui sekadar kekayaan material, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan psikologis. Dalam menghadapi dinamika perdagangan global, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dampak kebijakan impor pemerintah. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, beberapa aspek krusial mempengaruhi kepentingan ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah prinsip distribusi kekayaan yang adil, yang menjadi pijakan penting. Dalam Islam, penetapan upah lebih mengutamakan adil dan layak (Muttaqin et al., 2024). Sehingga keadilan dalam distribusi kekayaan dianggap sebagai prinsip inti, dan hal ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional. Negara-negara diharapkan untuk merancang kebijakan yang memastikan bahwa manfaat dari perdagangan tersebar secara merata di semua segmen masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu dan memerlukan (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021).

Di Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai impor barang telah menjadi topik yang sangat diperbincangkan dalam debat publik dan menjadi subjek utama dalam kajian akademis. Partisipasi Indonesia dalam perdagangan internasional yang bebas mendorong perkembangan industri domestik untuk meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor (Sood et al, 2024). Dengan masuknya produk impor ke dalam pasar domestik, masyarakat dan pelaku ekonomi seringkali mengalami berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Kebijakan pemerintah terkait impor memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menyimak setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait impor dalam berbagai sektor dan wilayah pastinya menghasilkan variasi yang signifikan, dengan argumen yang beragam pula (Devina et al, 2023), Ini dapat dijabarkan sebagai mengawasi secara efektif kinerja dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan pengoptimalan (Zain et al, 2023). Terutama dalam situasi di mana pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong pengembangan industri dalam negeri, penting untuk memahami dengan cermat bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diatur dan diimplementasikan.

Selain itu, dengan berkembangnya pemikiran ekonomi syariah sebagai alternatif yang dianggap lebih adil dan berkelanjutan dalam menyikapi sistem ekonomi konvensional, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan perdagangan. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi Islam dalam analisis perdagangan internasional, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam mempengaruhi pembuatan kebijakan perdagangan, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial (Abdullah et al, 2023). Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, dapat menjadi pedoman yang berharga dalam menilai dan mengatur kebijakan impor. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip fundamental yang sangat ditekankan adalah keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam,

tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan, sementara kelompok lainnya mendapat keuntungan. Prinsip ini mendasari keadilan distributif dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang merugikan sebagian pihak (Sari et al, 2023). Dengan memasukkan perspektif ekonomi syariah ke dalam perumusan kebijakan, diharapkan dapat diciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kebijakan impor pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan umum dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Hukum ekonomi syariah mempunyai fokus yang kuat pada aspek-aspek moral dan etika dalam kegiatan ekonomi, dengan menempatkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagai prinsip-prinsip utamanya. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata atas sumber daya dan kekayaan, serta menegaskan perlunya perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam transaksi ekonomi. Selain itu, prinsip keseimbangan menuntut agar ekonomi berjalan secara harmonis antara aspek material dan spiritual, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Prinsip keberlanjutan, yang menjadi inti dari ekonomi syariah, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dalam penggunaan sumber daya ekonomi untuk memastikan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

Dalam konteks kebijakan impor, perspektif hukum ekonomi syariah menjadi relevan karena menuntut evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan impor tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi. Hal ini berarti tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi langsung dari impor, tetapi juga dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi krusial dalam mengevaluasi kebijakan impor pemerintah. Evaluasi tersebut akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat landasan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, implementasi kebijakan impor yang memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman mengenai implikasi kebijakan impor pemerintah dalam konteks ekonomi syariah. Analisis terhadap kebijakan impor akan memungkinkan identifikasi dampaknya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Selain itu, melalui pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara kebijakan impor dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan dengan konteks ekonomi syariah. Rekomendasi tersebut tidak hanya akan mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ekonomi syariah. Dengan memperhitungkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap rekomendasi kebijakan, diharapkan dapat tercapai distribusi ekonomi yang lebih merata dan inklusif di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi syariah dan perumusan kebijakan yang lebih inklusif di Indonesia. Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah kebijakan yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Dalam menjalankan penelitian ini, metode yang digunakan adalah literatur review. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai literatur, artikel, jurnal, dan dokumen terkait kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor, dengan fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah. Langkah awal penelitian ini melibatkan identifikasi sumber-sumber yang relevan yang mencakup topik-topik seperti kebijakan perdagangan internasional, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan hukum ekonomi syariah. Kemudian, literatur-literatur tersebut dianalisis secara sistematis untuk memahami pendekatan dan sudut pandang yang berbeda terhadap topik yang diteliti. Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi syariah, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah terkait impor produk mempengaruhi aspek-aspek seperti keadilan distributif, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Melalui pendekatan literatur review ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman tentang implikasi kebijakan impor pemerintah dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian ini, akan dipaparkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor, yang telah diselidiki dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih mendalam bagaimana kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi aspek-aspek ekonomi yang relevan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, bab ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak kebijakan impor pemerintah dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta implikasi yang dihasilkan untuk keadilan distributif, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 1. Hasil Studi

Nama dan Tahun	Judul	Ringkasan
(Batubara et al, 2024)	"Pengaruh Perdagangan antara Indonesia-Mesir terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam"	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak perdagangan antara Indonesia dan Mesir terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan data ekspor-impor yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan dan data pertumbuhan ekonomi dari BPS periode 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ekspor Indonesia ke Mesir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara impor dari Mesir ke Indonesia berpengaruh positif dan signifikan. Uji simultan menunjukkan bahwa baik ekspor Indonesia ke Mesir maupun impor dari Mesir ke Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(Abdullah et al, 2023)	<p>“Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam”</p>	<p>Penelitian ini mengeksplorasi dinamika perdagangan internasional dengan menggunakan model politik Heckscher-Ohlin dan menginterpretasikannya dalam konteks kepentingan ekonomi nasional dari perspektif hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis teks, dengan data yang diperoleh dari literatur sekunder yang menyoroti hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi nasional. Temuan penelitian menegaskan bahwa teori Heckscher-Ohlin (HO) menjadi dasar utama dalam memahami ekonomi perdagangan internasional. Teori ini menekankan ketidaksetaraan dalam ketersediaan faktor produksi antar negara sebagai faktor utama yang mempengaruhi pola perdagangan. Faktor produksi utama dalam teori ini mencakup tenaga kerja dan modal, yang mendorong spesialisasi produksi untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Teori HO juga merujuk pada keunggulan komparatif, di mana negara-negara cenderung mengarahkan produksi ke barang-barang yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah. Analisis ini juga menghubungkan Teori HO dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang menyoroti pentingnya keadilan distributif, etika bisnis, integritas, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral individu dalam perdagangan internasional. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, perdagangan internasional berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.</p>
(Sari et al, 2023)	<p>“Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Inflasi”</p>	<p>Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pandangan ekonomi Islam menghadapi tantangan inflasi dalam struktur ekonomi masyarakat. Metode yang diterapkan adalah studi pustaka, di mana data dari berbagai sumber akan dianalisis secara menyeluruh. Dalam konteks ini, inflasi dijelaskan sebagai keadaan ekonomi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa disertai dengan penurunan nilai mata uang dalam periode waktu tertentu. Di Indonesia, inflasi bervariasi, dengan perbedaan signifikan dalam tingkat inflasi antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam mempertahankan stabilitas ekonomi serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p>

Meskipun dalam sejarahnya ekonomi Islam tidak menghadapi inflasi karena menggunakan mata uang dinar dan dirham yang stabil, dalam pandangan

		<p>ekonomi Islam, inflasi dapat diatasi dengan menggunakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Instrumen moneter dalam ekonomi syariah menekankan penghindaran riba dan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencegah terjadinya disparitas ekonomi dan mengurangi praktik plagiarasi, sehingga instrumen moneter yang digunakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan ekonomi.</p>
(Basri, 2023)	<p>“Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena”</p>	<p>Diskusi tentang pengaturan mekanisme pasar dan harga dalam Islam menekankan pentingnya regulasi untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam struktur ekonomi. Salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka, Nejatullah Siddiqi, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam melalui gagasan-gagasannya yang inovatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pandangan Nejatullah Siddiqi mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga yang adil dalam perspektif Islam. Pendekatan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif digunakan untuk meneliti fenomena ekonomi yang relevan dengan mekanisme pasar dan penetapan harga. Siddiqi mengusulkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi pasar, termasuk penyelesaian transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pentingnya perilaku konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan campur tangan pemerintah yang tepat. Analisis terhadap fenomena ekonomi saat ini juga mengidentifikasi tantangan seperti monopoli, dumping, dan praktik bisnis kartel. Selain itu, dalam konteks penetapan harga, terdapat masalah-masalah seperti asimetri informasi dan praktik diskon yang juga harus diperhatikan.</p>
(Umiyana F, 2023)	<p>“Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)”</p>	<p>Efek dari keputusan untuk melarang penjualan pakaian di toko barang bekas di Pasar Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, terbukti menyebabkan penurunan pendapatan para pedagang sebagai dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan para pedagang dengan dua pendekatan, yaitu dari perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data primer melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sampel populasi terdiri dari 56 pedagang toko barang bekas di Pasar Perumnas Way Halim, di mana seluruhnya diambil sebagai sampel penelitian. Analisis data menggunakan teknik regresi linear sederhana, uji</p>

hipotesis (uji t), dan koefisien determinasi, dengan kebijakan pelarangan penjualan pakaian di toko barang bekas sebagai variabel independen dan pendapatan pedagang sebagai variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan para pedagang, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) dan penerimaan terhadap hipotesis alternatif (H_a), menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas berpengaruh pada pendapatan para pedagang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan tersebut menimbulkan diskusi tentang praktik jual beli dalam masyarakat, di mana beberapa ulama menganggapnya sebagai salah satu prinsip utama dalam transaksi jual beli yang harus dipertimbangkan, sejalan dengan konsep Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Shighat (ijab qobul), dan Ma'qud (benda atau barang).

**(Qoni'ah,
2023)**

“Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global”

Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, namun hal ini belum mengakibatkan Indonesia menjadi produsen terkemuka dalam produk halal. Secara faktual, potensi pertumbuhan industri halal semakin berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk muslim secara global. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi dalam usaha meningkatkan ekspor produk halal Indonesia, termasuk kurangnya fokus dalam mengembangkan produk halal karena masih didominasi oleh ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan, adanya persaingan dari negara non-muslim yang juga mengembangkan industri halal, dan minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal.

Dengan demikian, strategi yang perlu dilakukan antara lain adalah meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, memperluas akses pasar ekspor produk halal dengan memanfaatkan perwakilan pemerintah di luar negeri, melibatkan UMKM dalam pameran internasional, serta memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, mendukung UMKM dalam rantai pasok global juga penting, serta optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat meraih peluang pasar digital dengan lebih efektif. Dengan strategi ini, diharapkan peran Indonesia dalam industri halal

global dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait impor produk. Evaluasi mendalam terhadap dampak kebijakan impor, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan impor yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesesuaian dengan nilai-nilai ekonomi syariah untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengutamakan Produk Impor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki implikasi yang penting terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah perlu dievaluasi secara cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat (Oktivany et al, 2023). Salah satu implikasi yang muncul adalah dalam hal distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif. Hal tersebut didukung dalam penelitian (Basri, 2023) melacak evolusi ekonomi dari perspektif sejarah, kapitalisme dan sosialisme telah menjadi dua sistem ekonomi dominan yang membentuk peradaban ekonomi global dari masa lampau hingga kini. Berbagai tantangan dan kompleksitas yang muncul telah mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi guna mengatur struktur perekonomian dengan harapan mencapai kemakmuran nasional. Selain itu, dalam aspek keberlanjutan ekonomi, kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan potensi kerugian ekonomi jangka panjang, seperti kehilangan daya saing produk lokal atau ketergantungan ekonomi pada negara lain, dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mendorong keberlanjutan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan implikasi kebijakan impor terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan pemerintah yang mengutamakan produk impor, perbandingan antara perspektif hukum ekonomi syariah dan prinsip ekonomi konvensional menjadi sangat relevan. Dari sudut pandang ekonomi konvensional, kebijakan impor sering kali didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan keuntungan ekonomi, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional secara keseluruhan (Sabri et al, 2023). Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat penekanan yang lebih besar pada keadilan distributif, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Reni et al, 2022). Praktiknya, kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor dapat berdampak beragam dalam dua perspektif ini. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan tersebut mungkin berhasil meningkatkan akses terhadap barang-barang murah dan beragam, yang dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun, dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja mungkin tidak selalu merata, dan bisa menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar.

Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan impor perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi (Mandira & Kusuma, 2023). Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam perdagangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama (Pranata, 2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mengidentifikasi kesenjangan antara pendekatan ekonomi konvensional dan hukum ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan ini, dapat diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan inklusif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah yang mengutamakan produk impor, penting untuk mengevaluasi implementasinya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Keberhasilan dan tantangan dalam

implementasi kebijakan ini menjadi fokus utama pembahasan. Secara positif, kebijakan tersebut dapat meningkatkan akses terhadap barang-barang yang sulit diproduksi secara lokal, serta memperluas variasi produk yang tersedia bagi konsumen. Namun, tantangan muncul terutama terkait dengan aspek keadilan distributif dan keseimbangan perdagangan (Prihatiningtyas et al, 2023). Dalam ekonomi syariah, keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijaga, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan produsen lokal atau menghasilkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, kebijakan impor juga harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi, baik dari sudut pandang lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan impor pemerintah, serta upaya untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi tantangan yang muncul, sehingga implementasi kebijakan dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijunjung tinggi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor perlu dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah. Terdapat ketidakselarasan antara beberapa kebijakan impor dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan kebijakan impor agar lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti dengan mengembangkan mekanisme distribusi yang lebih adil dan memberdayakan sektor-sektor ekonomi yang berkeadilan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan impor spesifik dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak kebijakan impor terhadap sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, industri, atau perdagangan. Selain itu, penelitian masa depan dapat menggali lebih dalam tentang pandangan masyarakat dan stakeholders terkait terhadap kebijakan impor dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian lanjutan dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan impor. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

REFERENCES

- Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2), 249-259.
- Aini, L., Manik, C. W., & Matondang, K. A. (2023). Pengaruh Perdagangan Inteenasional dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).
- Ardhana, F. M., Sa'adah, M., Putri, N. Y., Nugraha, I. G. N. Y. S., Pambudi, T. F., & Budiasih, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah dan Determinan Impor Kedelai Indonesia 1983–2019. In *Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2023, No. 1, pp. 439-448)*.
- Astuti, A. Y. (2022, September 26). Peran Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan PDB Negara Arab Saudi-Qotar (Tahun 2010-2020). <https://doi.org/10.31219/osf.io/vjux7>
- Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771-3786.
- Batubara, N. Z., Hasugian, H., & Imsar, I. (2024). Pengaruh Perdagangan antara Indonesia-Mesir terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

- Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 609-620.
- Devina, D., Nabilla, S. D., Labina, M. S. T., Chairunnisa, C., Saragih, R., & Antoni, H. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(1), 94-107.
- Mandira, I. M. C., & Kusuma, P. S. A. J. (2022). Strategi Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan. *Management And Accounting Expose*, 5(1).
- Muttaqin, M., Muhibban, M., Munir, M. M., & Amalia, N. (2024). Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 251-259.
- Nafi'ah, B., & Haerianingrum, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 24-36.
- Oktivany, C., Agustria, F., Tika, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *FeakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(01), 20-36.
- Pratama, R. B. A. (2023). Perlindungan Hukum UMKM Internasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Keadilan Sosial. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-17.
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-186.
- Putra. A. K, Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 1-10.
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Reni, R., Wahab, A., & Lutfi, M. (2022). Ekonomi Syariah Vs Ekonomi Konvensional. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 161-174.
- Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A. A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11047-11058.
- Sari, D. M., Putri, D. R., Nisa, K., & Nayla, R. A. (2023). Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Inflasi. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 278-288.
- Sood, M., Mahmuluddin, M., & Zulkarnaen, Z. (2024). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1).
- Umiyana, F. (2023). Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Zain, H. M., & Agustin, D. A. C. (2023). Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Impor Baju Bekas (Analisis Framing pada Tempo. co dan Media Indonesia). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 9(2).